

ANALISIS EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN¹⁾

(Ecotourism Assessment in Gunung Halimun National Park)

**Sudhiani Pratiwi, Hadi S. Alikodra²⁾,
Soehartini Sekartjalarini²⁾, dan Hariadi Kartodihardjo²⁾**

ABSTRACT

The establishment process of Gunung Halimun National Park resulted in tenurial insecurity for local people, farmers, and hunters. This condition leads to the open conflict between local people and the government. One of the issues that make local people fight for is their rights to have an access and control toward the resources. As a development model of sustainable tourism, ecotourism has been used to respond this type of conflict. The aims of this study were to evaluate whether or not the ecotourism development in the case study perform the ideal criteria of ecotourism concept and to determine how the existing institutional arrangement support the fulfillment of the criteria. Two analytical methods were used to achieve these goals. They were analysis of the performance of ecotourism criteria and institutional analysis of ecotourism development (consists of stakeholder analysis, need analysis and policy analysis). The results of ecotourism assessment showed that the ecotourism development in the case study do not fulfill the ideal criteria of ecotourism. While the result of institutional analysis indicated three main findings, namely, insufficient rules and policy to guide ecotourism development, unequal role between stakeholders of ecotourism development, and lack of accountability in implementing the roles in the study area. This study suggests that in order to perform the ideal ecotourism development, stakeholders should develop agreed local ecotourism policy, reinforce existing organization and improve the capacity of human resources.

Key words: ecotourism, institution, national park, policy analysis, qualitative analysis

PENDAHULUAN

Penetapan kawasan konservasi merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menangani persoalan degradasi keanekaragaman hayati. Dari luas kawasan konservasi sebesar 22.2 juta ha yang terdapat di Indonesia, 64.4% di antaranya taman nasional (Dephut, 2000). Dalam pelaksanaannya, proses penetapan dan pengelolaan kawasan taman nasional ini menimbulkan banyak konflik dengan masyarakat lokal. Konflik dalam proses penetapan dan pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) merupakan salah satu di antaranya.

Konflik di kawasan Gunung Halimun sudah berlangsung jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1992 dan

¹⁾ Bagian dari disertasi penulis pertama, Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana IPB

²⁾ Berturut-turut Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing

perluasannya 2003 (Adimihardja, 1992; Alikodra, 1992, Galudra 2003). Berdasarkan penelusuran literatur dan observasi lapangan, sampai saat ini, ada empat jenis konflik yang timbul di masyarakat, salah satu di antaranya konflik akses dan kontrol terhadap sumber daya alam (Hendarti, 2004; Hidayati, 2004; Galudra, 2003).

Sebagai model operasional dari konsep pariwisata berkelanjutan, ekowisata sering digunakan sebagai salah satu cara untuk merespons konflik akses dan kontrol dalam pengelolaan sumber daya alam (Sekartjajarini, 2003; Furze *et al.*, 1997; Boo, 1990). Persoalannya, di TNGH, konflik masih berlanjut meskipun kegiatan ekowisata sudah dilakukan. Beberapa penelitian menyebutkan perlunya evaluasi terhadap konsep pengembangan yang digunakan mengingat banyak terjadi kegiatan yang menggunakan label ekowisata untuk kepentingan di luar tujuan ekowisata yang sesungguhnya (Wall and Ross, 1998; Furze *et al.*, 1997; Pratiwi, 2000).

Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, ada lima kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat disebut ekowisata (Sekartjajarini dan Legoh, 2004). Kelima kriteria tersebut ialah 1) tujuan pemanfaatan sumber daya alam untuk perlindungan, 2) pelibatan masyarakat secara aktif, 3) produk wisata yang mengandung unsur pembelajaran dan pendidikan lingkungan, 4) dampak positif pada ekonomi lokal, dan 5) dampak minimal pada lingkungan. Kelima kriteria ini kemudian disebut sebagai kriteria kecukupan ekowisata.

Aspek lain yang menentukan sukses atau tidaknya implementasi konsep ekowisata ialah institusi. Secara teoritis, institusi merupakan sekumpulan aturan formal dan informal yang mengatur perilaku individu (Douglas North dalam Gordillo de Anda, 1997) dan pola hubungan antaranggota masyarakat, organisasi, dan/atau antaraktor pembangunan yang saling mengikat dan diwadahi dalam sebuah organisasi atau jaringan (Kartodihardjo dan Jhamtani, 2006). Fungsi institusi adalah untuk memberikan pedoman berperilaku dan mengurangi derajat ketidakpastian karena hak dan kewajiban seseorang sudah diatur berdasarkan kesepakatan yang diakui (Hayami dan Kikuchi, 1981 dalam Suhaeri 1994). Berdasarkan definisi dan fungsinya, aspek ini perlu diteliti untuk mengetahui sejauh mana organisasi dan aturan main/kebijakan yang ada mendukung pencapaian pemenuhan kriteria kecukupan ekowisata yang ideal.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami sejauh mana konsep ekowisata dapat diimplementasikan, misalnya, studi mengenai model perencanaan ekowisata bersama masyarakat lokal dan proses partisipasi masyarakat dalam ekowisata (Pratiwi, 2000). Di kawasan TNGH, beberapa penelitian ekowisata, di antaranya, mengenai keterkaitan antara ketersediaan sumber daya dan potensi permintaan (Rosdiana, 1994), pengelolaan ekowisata yang berbasis masyarakat di TNGH (Nugraheni, 2002), perilaku pengunjung (Naibaho, 2002), strategi promosi kegiatan wisata di TNGH (Ambinari, 2003), dan nilai manfaat ekonomi dan pemanfaatan TNGH, termasuk pemanfaatan untuk ekowisata (Widada, 2004). Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan adanya gap antara ekowisata yang dikonseptualisasikan dalam literatur dengan fakta empiris di lapangan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan ulasan penelitian yang sudah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai bagaimana konsep ekowisata diimplementasi dalam kegiatan yang nyata dan implikasinya terhadap kinerja pengelolaan taman nasional sangat diperlukan. Untuk maksud

tersebut studi ini dilakukan. Ada dua tujuan dari penelitian ini, tujuan pertama ialah untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pengembangan ekowisata di lokasi studi memenuhi kriteria kecukupan konsep ekowisata yang ideal atau tidak, tujuan yang kedua ialah mengidentifikasi sejauh mana institusi pengembangan ekowisata yang ada mendukung pencapaian kriteria kecukupan tersebut. Tujuan ini akan dicapai melalui analisis kriteria kecukupan pengembangan ekowisata dan analisis institusi (analisis stakeholder, analisis kebutuhan, dan analisis kebijakan).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah 2 propinsi dan 3 kabupaten, yaitu Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bogor dan Sukabumi, dan Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Lebak. Untuk pengambilan data, empat lokasi dipilih sebagai lokasi studi, yaitu 1) Desa Citorek, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak; 2) Kampung Pangguyangan, Desa Sirnarasa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi; 3) Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor; 4) Desa Cisarua, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Dari lima tradisi penelitian kualitatif ini memfokuskan pada sebuah studi kasus.

Teknik pengumpulan data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan *non-probability sampling design*, yaitu *convenience* dan *purposive sampling*. *Convenience sampling* digunakan karena populasi dokumen yang terkait dengan penelitian tidak dapat diidentifikasi, sedangkan *purposive sampling design* digunakan untuk menemukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu dengan membangun kriteria. Sampai dengan Juli 2007, diperoleh 38 dokumen dan 70 kebijakan yang relevan dengan isu ekowisata di TNGH. Dari dokumen ini, data diidentifikasi dengan menggunakan *content analysis*.

Teknik pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan melakukan observasi untuk verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari data sekunder. Kedua, melakukan survei dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Kedua teknik digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam dari responden. Responden dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan metode *snowball*. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih lokasi penelitian dengan membangun kriteria. Kemudian pada tiap-tiap kelompok *stakeholders*, metode *snowball* digunakan untuk menentukan responden yang dianggap relevan dan memahami isu yang sedang diteliti. Pada pengumpulan data primer ini, *content analysis* digunakan untuk mengekstrak informasi dari hasil wawancara. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 60 responden.

Survei dan observasi lapangan dilakukan selain mengunjungi lokasi studi

juga mengikuti beberapa pertemuan, seperti seminar, diskusi, lokakarya, atau konsultasi publik yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan ekowisata di TNGH. Survey dan observasi ke empat lokasi studi dilakukan antara bulan Desember 2006 sampai dengan April 2007.

Validitas data

Dalam penelitian ini, digunakan empat teknik tes validitas, yaitu *face validity*, teknik triangulasi, *feedback*, dan *rich data*. *Face validity* digunakan untuk data yang diperoleh dari hasil *content analysis* (Babbie, 1998; Kiah, 1976). Teknik triangulasi merupakan teknik yang dengannya data dan informasi dikumpulkan dengan metode yang berbeda (Alwasilah, 2002). Teknik tes *feedback* merupakan cara peneliti meminta masukan, saran, kritik, dan komentar dari orang lain (Alwasilah, 2002). Teknik *rich data* atau data yang melimpah merujuk pada data yang lengkap dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber (Alwasilah, 2002). Fungsi data dalam teknik ini adalah untuk memperkaya dan menguatkan interpretasi terhadap fenomena penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kriteria Kecukupan Ekowisata

Ada lima kriteria yang digunakan untuk analisis kecukupan pengembangan ekowisata di TNGH. Kriteria pertama, tujuan pengembangan ekowisata, secara ideal ialah pemanfaatan sumber daya alam untuk pelestarian dan perlindungannya (Ceballos-Lascurain, 1996; Wall dan Ross, 1998). Dari dua variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi kriteria ini, yaitu definisi dan tujuan pengembangan, hasil analisis mengindikasikan adanya bias pemahaman terhadap kriteria ini yang diindikasikan baik oleh responden maupun dokumen.

Kriteria kedua ialah partisipasi masyarakat. Secara ideal partisipasi aktif artinya melibatkan semua unsur masyarakat untuk berinisiatif terlibat dari tahap insiasi kegiatan sampai pengambilan keputusan (Pratiwi, 2000; Furze *et al*, 1997). Dari empat variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi kriteria ini, hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel keterlibatan masyarakat yang disepakati baik oleh responden maupun dokumen. Namun, hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber mengindikasikan sekelompok masyarakat tertentu saja, yaitu kelompok elit dan kelompok yang berada dekat lokasi obyek wisata, yang dilibatkan. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata walaupun partisipatif masih menimbulkan konflik horizontal. Inisiatif partisipasi diindikasikan secara berbeda oleh dokumen dan responden. Karakteristik masyarakat yang terlibat dan level partisipasinya belum menjadi perhatian sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik.

Kriteria ketiga ialah produk ekowisata. Secara ideal produk ekowisata harus mengandung unsur pembelajaran dan pendidikan mengenai lingkungan (Ceballos-Lascurain, 1996; Sekartjagrarni, 2003). Dari dua variabel yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, jenis aktivitas wisata dan tujuan kedatangan wisatawan, hasil analisis terhadap dokumen dan kuesioner menunjukkan bahwa kedua unsur ini sudah dipenuhi dalam pengembangan ekowisata di lokasi studi. Meskipun demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana pengaruh

produk wisata ini dalam mengubah perilaku (*behaviour*) wisatawan dan masyarakat terhadap program konservasi di TNGH.

Kriteria keempat ialah dampak terhadap ekonomi lokal. Secara ideal ekowisata harus memberikan dampak positif pada ekonomi lokal baik langsung maupun tidak langsung (Ceballos-Lascurain, 1996; Gakahu, 1992). Berdasarkan hasil identifikasi pada dokumen dan responden, dapat disimpulkan bahwa ekowisata memberikan peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan diversifikasi lapangan kerja. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh informasi bahwa pendapatan yang diperoleh dari ekowisata masih di bawah pendapatan pokok dari bertani dan sifatnya tidak tentu. Informasi ini diperkuat oleh hasil studi sebelumnya yang dilakukan Widada (2004) dan Nugraheni (2002).

Kriteria kelima ialah dampak terhadap lingkungan. Pengembangan ekowisata harus memberikan dampak yang minimal terhadap lingkungan (Ceballos-Lascurain, 1996; Sekartjajarini dan Legoh, 2004; Boo, 1990). Faktor dan variabel dampak lingkungan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah biofisik (tanah, air, vegetasi, dan hidupan liar), dan sosial budaya (Sekartjajarini dan Legoh, 2004; Ceballos-Lascurain, 1996). Data untuk analisis ini diperoleh dari identifikasi data sekunder (Widada, 2004; Naibaho, 2002) dan observasi langsung. Hasil analisis menunjukkan indikasi adanya kerusakan biofisik. Dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat lokal di antaranya adalah timbulnya konflik horizontal (karena belum semua masyarakat mendapat keuntungan dari ekowisata) dan komersialisasi budaya sebagai produk wisata. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut apakah dampak ini berasal dari pengunjung atau karena faktor lainnya. Rangkuman hasil analisis untuk kriteria 1 sampai dengan 4 ini disajikan pada Tabel 1.

Analisis Institusi

Berdasarkan analisis *stakeholders* dapat diketahui adanya 34 kelompok atau instansi yang terkait dengan pengembangan ekowisata di TNGH. Berdasarkan kategori *stakeholders* kelompok atau instansi ini terbagi ke dalam 12 *stakeholder* utama (masyarakat lokal termasuk aparat desa), 11 *stakeholder* kunci (terdiri dari instansi pusat dan daerah) dan 11 *stakeholder* pendukung (terdiri dari LSM, perguruan tinggi, lembaga donor, individu, dan swasta). Pada tahap inisiasi, hubungan antar*stakeholder* ini diwarnai kerjasama dan koordinasi yang ditandai dengan terbentuknya Konsorsium Pengembangan Program Ekowisata di TNGH (KPPETNGH) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat lokal. Namun, pada tahap pelaksanaan, hubungan kerja sama dan koordinasi ini berhenti seiring dengan selesainya pendanaan proyek dari USAID. KSM kemudian menjalankan program pengembangan ekowisata hanya dengan didampingi oleh LSM, Yayasan Ekowisata Halimun. Berdasarkan analisis kebutuhan *stakeholder*, terdapat tiga kebutuhan masyarakat yang diperlukan untuk tetap bertahan dalam pengembangan ekowisata. Ketiga kebutuhan tersebut ialah dukungan dan kerja sama para pihak, peningkatan kapasitas anggota KSM, dan pendanaan.

Tabel 1. Hasil analisis kriteria 1 - 4 kecukupan ekowisata

Kriteria kecukupan ¹		Kondisi saat ini di TNGH		
Kriteria	Ideal	Hasil	A (%)	B(%) *
1. Tujuan Pengembangan				
a. Definisi	Konsep atau model pembangunan pariwisata yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas wisata alam • Pengembangan wisata yang memberi manfaat ekonomi bagi kawasan konservasi dan masyarakat lokal 	50.0	41.2
b. Tujuan	Pemanfaatan sumber daya alam untuk pelestarian dan perlindungannya	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar • Pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar 	31.6	52.9
2. Partisipasi masyarakat				
a. Keterlibatan masyarakat	Terlibat aktif	Terlibat atau dilibatkan	76.3	64.7 1
b. Inisiatif partisipasi	Masyarakat sendiri atau bersama pihak luar	a. BTNGH	42.1	
c. Karakteristik masyarakat	Seluruh unsur masyarakat	b. Masyarakat dan LSM <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi pemukiman: <i>enclave</i> • Status sosial: semua unsur masyarakat • Status ekonomi: menengah-bawah • Gender: laki-laki dan perempuan 	64.7	58.8
d. Level partisipasi	Dari tahap inisiasi sampai pengambilan keputusan	Proses nominal	34.2	
		Pengambil keputusan	47.1	
		Tidak ada informasi	42.1	
3. Produk ekowisata				
Produk wisata	mengandung unsur pembelajaran dan pendidikan mengenai lingkungan	a. Jenis aktivitas: Wisata alam	30.0	58.8 1
		b. Unsur pembelajaran dan rekreasi dalam produk wisata	60.5	41.2 1
		c. Tujuan wisatawan : pendidikan, rekreasi, penelitian	49.7	64.6 1
4. Dampak terhadap ekonomi lokal				
Dampak ekonomi lokal	Memberikan dampak positif pada ekonomi lokal baik langsung maupun tidak langsung	1. Dampak langsung		
		a. Peluang kerja	60.5	60.9 1
		b. Peningkatan pendapatan:		
		1) Ya		64.7
		2) Tidak	68.4	
		c. PAD: BTNGH	23.1	76.5 1
		2. Dampak Tidak langsung		
		• Diversifikasi lapangan kerja	57.9	94.1 1
		Total variabel yang dianalisis 21		7

Sumber: Boo, 1990; Stewart dan Sekartjajrarini, 1994; Furze *et al*, 1997; Ceballos-Lascurain, 1996; Wall dan Ross, 1998; Sekartjajrarini dan Legoh, 2004; Pratiwi, 2000; Gakahu, 1992

Keterangan: A= data dari dokumen; B= data dari responden; % = diambil hanya dari respons terbanyak; *=respons yang sama

Analisis kebijakan dilakukan untuk mengetahui peran apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing *stakeholder*. Hasil analisis mengindikasikan bahwa hanya 4.3% dari 47 dokumen kebijakan terkait mengatur ekowisata secara khusus. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata selama ini masih mengacu pada aturan pengembangan pariwisata umum lainnya. Dari dokumen yang sama diidentifikasi peran masing-masing *stakeholder* dalam tiap-tiap kriteria kecukupan ekowisata (Tabel 2). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa semua *stakeholder* memiliki peran untuk pencapaian kriteria kecukupan ekowisata. Namun, peran ini masih didominasi oleh pemerintah pusat. Secara ringkas peran yang harus dijalankan masing-masing *stakeholder* adalah sebagai berikut.

- (1) pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan, penyusun pedoman pelaksanaan, kriteria dan standar operasional, pemberi izin dan sanksi, dan pembina.

- (2) *stakeholder* pendukung (lainnya) sebagai penyedia modal usaha, jasa, sarana dan prasarana, dan pemenuhan kewajiban bagi pemegang izin usaha;
- (3) pemerintah daerah sebagai pelaksana sosialisasi program pemerintah, penegakan hukum, pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi serta rekomendasi izin pariwisata;
- (4) masyarakat sebagai pemeran yang pasif berupa pemberi saran, pertimbangan, dan partisipasi pada program yang dibawa pihak luar, serta peran pengawasan dan pemeliharaan.

Tabel 2. Distribusi peran stakeholder dalam pemenuhan kriteria kecukupan ekowisata

Kriteria kecukupan ekowisata	Stakeholders					Jumlah
	Lain-lain	Masyarakat	Pemerintah kabupaten	Pemerintah provinsi	Pemerintah pusat	
Dampak ekonomi lokal	3	4	1	1	7	16
Dampak lingkungan	3		3	8	10	24
Partisipasi masyarakat	12	13	8	6	16	55
Penetapan tujuan	4	3	2	1	13	23
Produk ekowisata	1		1	1	4	7
Grand total	23	20	15	17	50	125
%	18.4	16	12	13.6	40	

Hasil observasi lapangan dan wawancara mengindikasikan bahwa dalam pengembangan ekowisata di TNGH, hanya tiga *stakeholder* yang berperan cukup aktif, yaitu masyarakat, pemerintah pusat (UPT/BTNGH), dan LSM. Peran pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya hampir tidak ada atau sangat kecil. Kerja sama yang dilakukan juga masih terbatas pada pengembangan produk wisata dan inisiasi pemenuhan kriteria pengembangan ekonomi lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- (1) Hanya satu dari lima kriteria kecukupan ekowisata yang dipenuhi dalam pengembangan ekowisata di lokasi studi saat ini, yaitu kriteria produk wisata.
- (2) Empat kriteria lainnya tidak terpenuhi karena adanya bias pemahaman terhadap konsep ekowisata (kriteria tujuan ekowisata), hanya sekelompok masyarakat tertentu saja (elit dan yang berada dekat lokasi obyek wisata) yang dilibatkan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, belum optimalnya pemenuhan kriteria ekonomi, dan masih kurangnya penelitian mengenai dampak lingkungan.
- (3) Walaupun kebijakan yang mengatur pengembangan ekowisata secara khusus relatif masih sangat sedikit, kebijakan pengembangan pariwisata secara umum cukup memberikan arahan pada para pihak untuk berperan dalam memenuhi kriteria kecukupan ekowisata.
- (4) Meskipun peran para pihak, terutama tugas dan kewenangan instansi pemerintah pusat dan daerah, telah ditetapkan dalam kebijakan normatif,

masih banyak pihak yang belum dapat melaksanakan perannya tersebut karena berbagai hal (ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau lainnya).

- (5) Peran dalam kebijakan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Padahal, karena karakteristik obyek wisata dan lingkungannya, ekowisata menekankan pada partisipasi aktif aktor lokal.

Saran

Untuk memenuhi kriteria kecukupan ekowisata di lokasi studi, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) penyusunan suatu panduan pelaksanaan ekowisata yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kebijakan normatif yang ada, dan kesepakatan serta kebutuhan para pihak di tingkat lokal;
- (2) pengembangan dan penguatan kapasitas organisasi yang telah ada dengan melibatkan *stakeholders* yang lebih luas, minimal yang perannya sudah teridentifikasi dalam kebijakan;
- (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman para pihak terhadap konsep ekowisata termasuk kriteria kecukupannya dan kebijakan terkait yang mengaturnya mengingat kesadaran para pihak untuk menjalankan perannya sangat rendah;
- (4) studi lebih lanjut mengenai sejauh mana produk ini dapat mengubah persepsi dan perilaku pengunjung serta masyarakat, sebagai operator terhadap program konservasi di TNGH.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. 1992. *Kasepuhan yang Tumbuh di Atas yang Luruh*. Bandung: Tarsito.
- Alikodra, H.S. 1992. Pengembangan Kawasan Cagar Alam Gunung Halimun, Jawa Barat. dalam Ryadisoetrisno, B [editor]. 1992. *Konservasi dan Masyarakat: Rumusan Workshop Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Barat*. Jakarta: Biological Science Club (BSSC). Hal 11-19, 28-42.
- Ambinari, M. 2003. Pengkajian terhadap Strategi Promosi Kegiatan Ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana.
- Alwasilah, A.C. 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Babbie, E. 1998. *The Practice of Social Research*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Boo, E. 1990. *Ecotourism: The Potentials and Pitfalls*. Volume 1. Washington, D.C: World Wildlife Fund.

- Ceballos-Lascurain, H. 1996. *Tourism, Ecotourism and Protected Area*. Switzerland: IUCN.
- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2000. *Studi Awal Pengembangan Eco-tourism di Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Direktorat Pengembangan Wisata Alam, Hutan dan Kebun, Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam, Dephut dengan JICA dan RAKATA.
- Fraenkel, J.R. and Norman, E.W. 1996. *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill.
- Furze, B., De Lacy, T. and Birkhead, J. 1997. *Culture, Conservation and Biodiversity*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Galudra, G. 2003. *Conservation policies versus reality: Case study of flora, fauna, and land utilization by local community in Gunung Halimun-Salak National Park*. Bogor: ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2003_4.
- Gakahu, C.G. 1992. Participation of local communities in ecotourism: Rights, roles and socio-economic benefits (Masai Mara/Serengeti Ecosystem). Gakahu, C.G., and B.E. Goode [Editor]. 1992. *Ecotourism and Sustainable Development in Kenya*. Pp. 117-123. The Proceeding of the Kenya Ecotourism Workshop. September 13-17th, 1992. Lake Nakuru National Park, Kenya: Wildlife Conservation International.
- Gordillo de Anda, G. 1997. *The Reconstruction of Rural Institutions*. Rome: FAO.
- Hendarti, L. 2004. No Land No Foods. *SPARK News Letter* Issue No. 17, June 2004 English version: 3-4. Quezon City: Voluntary Service Overseas Philippines (VSO) and Environmental Science for Social Change (ESSC).
- Kartodiharjo, H. dan Jhamtani, H. [editor]. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox.
- Kiah, R.B. (1976). *A content analysis of children's contemporary realistic fiction about black people in the United States to determine if and how a sampling of these stories portray selected salient shared experiences of black people*. Doctoral dissertation, Dept. of Elementary and Special Education College of Education, Michigan State University, East Lansing, Michigan.
- Naibaho, H.A. 2002. *Studi Perilaku Pengunjung dalam Kegiatan Ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun [skripsi]*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan, Jurusan Konservasi Sumber daya Hutan.
- Nugraheni, E. 2002. *Sistem Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional: Studi Kasus Taman Nasional Gunung Halimun [tesis]*. Bogor : Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.

- Pratiwi, S. 2000. *Community Participation in Ecotourism Development: A Critical Analysis of Select Published Literature* [thesis]. East Lansing, Michigan: Michigan State University.
- Rosdiana, E. 1994. *Pengembangan Wisata Alam di Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Barat* [tesis]. Bogor : Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.
- Sekartjakrarini, S. 2003. *Pengelolaan dan pengembangan eco-tourism di Taman Nasional*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya "Pengembangan Model Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun" do Hotel Kinasih, Caringin, Bogor, 18-19 Februari 2003. LIPI-JICA-BTNGH.
- Sekartjakrarini, S., dan Legoh, N. 2004. *Rencana Strategis Nasional Ekowisata*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia.
- Stewart, W.P., Sekartjakrarini, S. 1994. Disentangling ecotourism. *Annals of Tourism Research Journal*. Volume 21(4) page 840-843.
- Suhaeri. 1994. *Pengembangan Kelembagaan Taman Nasional Gunung Halimun* [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.
- Wall, G, and Ross, S. 1998. *Ecotourism towards congruence between theory and practice*. Waterloo, Canada: Faculty of Environmental Studies, University of Waterloo . Paper was presented at 7th *International Symposium Society and Resource Management*, May 27-31, 1998. University of Missouri-Columbia.
- Widada. 2004. *Nilai Manfaat Ekonomi dan Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun bagi Masyarakat* [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana.